

# SEJUMLAH SKANDAL PEMIMPIN POLITIK DI INDONESIA: SIGNIFIKANSI TERHADAP KELUARAN 18: 21

Andreas Maurenis Putra

## **Abstract:**

*This article examines the scandals of political leaders in Indonesia through the methods of literature analysis and Biblical analysis, with a particular focus on the significance of Exodus 18:21. The research aims to affirm the urgency of ethical leadership amidst the scandals that ensnare political leaders in Indonesia and provide a Biblical perspective on the issue. By analyzing the political landscape from various literatures, the main causes of these scandals will be identified, and then synthesized with the principles outlined in Exodus 18:21. The findings suggest that the ethical framework provided in Exodus 18:21 can be an important guideline for political leaders in Indonesia, providing insights into effective governance, accountability and integrity.*

**Keywords:** scandal, political leaders, Indonesia, Exodus 18:21, literatur analysis, biblical analysis

## **Abstrak:**

Artikel ini meneliti skandal para pemimpin politik di Indonesia melalui metode analisis literatur dan analisis Biblika, dengan fokus khusus pada signifikansi Keluaran 18: 21. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan urgensi kepemimpinan beretika di tengah skandal yang menjerat para pemimpin politik di Indonesia dan memberikan perspektif Alkitab tentang masalah ini. Dengan menganalisis lanskap politik dari berbagai literatur, penyebab utama dari skandal-skandal ini akan diidentifikasi, dan kemudian disintesis dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Keluaran 18: 21. Temuan-temuan yang ada menunjukkan bahwa kerangka etis yang diberikan dalam Keluaran 18: 21 dapat menjadi pedoman penting bagi para pemimpin politik di Indonesia, yang memberikan wawasan tentang tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabilitas, dan integritas.

**Kata-kata Kunci:** skandal, pemimpin politik, Indonesia, Keluaran 18: 21, analisis literatur, analisis biblika

## **PENDAHULUAN**

Kepemimpinan politik memainkan peran penting dalam membentuk nasib suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, sebuah negara dengan populasi yang

beragam dan lanskap politik yang kompleks, realitas pemimpin politik memiliki arti penting karena hal ini secara langsung mempengaruhi pembangunan bangsa dan kesejahteraan warganya. Saat ini, realitas pemimpin politik di Indonesia merupakan gabungan dari berbagai macam individu dengan berbagai macam kualitas dan motivasi. Sementara beberapa pemimpin benar-benar berjuang untuk kemajuan bangsa, yang lain memprioritaskan keuntungan pribadi. Maka dapat dikatakan bahwa realitas pemimpin politik kini ditandai dengan perpaduan antara kemajuan dan kemunduran. Warga negara tentu merasa bangga dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai. Namun kemunduran-kemunduran dalam dinamika bernegara dan berbangsa harus juga diperhatikan secara serius. Kemunduran-kemunduran yang dimaksud adalah sejumlah skandal politik yang semakin menggurita seperti korupsi, nepotisme, grafitasi, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, suap, favoritisme, dan patronase.

Sejatinya, skandal politik melanda negara-negara di seluruh dunia dan terus mengikis kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin politik. Seperti yang diamati oleh Brandon Rottinghaus, "pada dasarnya, skandal itu seperti api di padang rumput-mudah berkobar, sulit dikendalikan, dan sulit dihentikan setelah dimulai".<sup>1</sup> Memang, di luar perang dan kemerosotan ekonomi, skandal mungkin merupakan kekuatan yang paling mengganggu dan merusak dalam politik.<sup>2</sup> Sebagai fakta yang meresap dan bertahan lama dalam kehidupan politik, skandal telah menjadi subjek pengawasan empiris yang serius.<sup>3</sup> Para akademisi juga telah mulai membangun teori yang mengevaluasi perilaku strategis para politisi di tengah skandal politik.<sup>4</sup> Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara juga tidak kebal terhadap fenomena ini.

Skandal yang melibatkan para politisi telah menjadi topik yang sangat memprihatinkan dan berimplikasi pada kondisi sosio-politik di negara ini. Skandal

---

<sup>1</sup> Brandon Rottinghaus, *The Institutional Effects of Executive Scandals* (Cambridge University Press, 2015), 161.

<sup>2</sup> Wioletta Dziuda dan William G. Howell, "Political Scandal: A Theory," *American Journal of Political Science* 65, no. 1 (2021): 2, <https://doi.org/10.1111/ajps.12568>.

<sup>3</sup> David R. Dewberry, *The American Political Scandal: Free Speech, Public Discourse, and Democracy*, 2024, 4–12, <https://rowman.com/ISBN/9781442242920/The-American-Political-Scandal-Free-Speech-Public-Discourse-and-Democracy>.

<sup>4</sup> Andrei S. Markovits dan Mark Silverstein, *The Politics of Scandal: Power and Process in Liberal Democracies* (Holmes & Meier, 1988), VII.

politik telah muncul sebagai masalah yang berulang dalam lanskap politik Indonesia, yang mengungkapkan kasus-kasus korupsi, suap, nepotisme, grafitasi, patronase, dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi menjerat beberapa pejabat publik seperti Abdul Gani Kasuba, Jhonny G. Plate, dan Syahrul Yasin Limpo. Kasus nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan Presiden Jokowi.<sup>5</sup> Pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh eks ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan eks ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.<sup>6</sup> Lalu skandal putusan Badan Legislatif (Baleg) DPR RI yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal *threshold* Pilkada.<sup>7</sup> Skandal eks Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali yang menerima dana hasil pemotongan insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.<sup>8</sup> Politik uang yang menyeret nama calon anggota legislatif DPR dari Partai Golkar, Ranny Fahd A. Rafiq.<sup>9</sup>

Skandal-skandal ini telah mengikis kepercayaan publik, menghambat pembangunan ekonomi, dan melemahkan institusi demokrasi. Maka menjadi penting untuk menyoroiti masalah ini dan mengeksplorasi strategi potensial untuk memitigasi skandal tersebut dan memulihkan kepercayaan publik. Dengan menganalisis sejumlah skandal yang melibatkan para pemimpin politik, artikel ini berupaya untuk mengetahui penyebab mendasar yang berkontribusi pada terjadinya skandal tersebut. Selain itu, dengan melakukan analisis biblika, artikel ini juga mengeksplorasi relevansi Keluaran 18: 21 dengan iklim politik di Indonesia

---

<sup>5</sup> Ryan Maulana, "Soal Data Parpol Jokowi, NasDem: Skandal Politik Publik," *Tempo* (18 September 2023). <https://video.tempo.co/read/35124/soal-data-parpol-jokowi-nasdem-skandal-politik-publik>

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, "Lembaga Yudikatif di Titik Nadir, 3 Ketua Dipecat Tersangkut Pelanggaran Kode Etik," *Bisnis.com* (6 Juni 2024). <https://kabar24.bisnis.com/read/20240706/15/1779903/lembaga-yudikatif-di-titik-nadir-3-ketua-dipecat-tersangkut-pelanggaran-kode-etik>.

<sup>7</sup> Ihsanuddin Vitorio Mantalean, "Baleg Akali Putusan MK, Perubahan "Threshold" Pilkada Hanya untuk Parpol Tanpa Kursi DPRD." *Kompas* (21 Agustus 2024). <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/13495571/baleg-akali-putusan-mk-perubahan-threshold-pilkada-hanya-untuk-parpol-tanpa>.

<sup>8</sup> Suseno, "Ahmad Muhdlor Ali Didakwa Terima Dana Pemotongan Insentif BPPD Sidoarjo," *Tempo* (30 September 2024). <https://metro.tempo.co/read/1922587/ahmad-muhdlor-ali-didakwa-terima-dana-pemotongan-insentif-bppd-sidoarjo>.

<sup>9</sup> Ade Ridwan Yandwiputra, "Tebar Uang Menjelang Pencoblosan," *Tempo* (14 Februari 2024). <https://koran-tempo-co.cdn.ampproject.org/v/s/koran.tempo.co/amp/hukum/487253/kasus-politik-uang-pemilu-2024?>

terutama persoalan skandal yang menjerat pemimpin politik/pejabat publik. Isu skandal politik aplikatif dari sudut pandang teks yang dipilih (Keluaran 18: 21) karena teks ini menyoroti prinsip-prinsip kepemimpinan etis dan pemerintahan yang baik yang harus dimiliki seorang pemimpin.

Penelitian tentang skandal politik di Indonesia, kepemimpinan dalam konteks Keluaran 18, maupun kepemimpinan di Indonesia dalam kaitannya dengan pesan Keluaran 18 bukan diskusi yang sama sekali baru. Beberapa peneliti telah meneliti dan membahas persoalan ini secara ekstensif. Zaenur Rohman, seorang peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), mengatakan bahwa skandal-skandal yang terjadi belakangan ini bisa menjadi indikator buruknya uji kelayakan yang dilakukan oleh Jokowi dalam proses perekrutan calon menteri. Tidak ada proses untuk menilai rekam jejak, latar belakang, dan kepemimpinan calon menteri. Jokowi lebih mengutamakan untuk mengakomodir kebutuhan partai pendukung dan relawan pendukung. Sehingga kapasitas calon, integritas dan sebagainya, tidak dilihat sebagai faktor yang sangat penting.<sup>10</sup>

Hergyana Saras Ningtyas dan Sriyati dalam artikel jurnal mereka yang berjudul *Refleksi Pemimpin Yang Memberdayakan Berdasarkan Keluaran 18: 18-24 (2021)*<sup>11</sup> mengatakan bahwa suksesi kepemimpinan masa kini membutuhkan untuk membentuk pemimpin yang unggul menghadapi kompetisi, inovasi, serta kemampuan suksesi kepemimpinan yang dapat diwujudkan dalam kepemimpinan memberdayakan. Pemimpin yang memberdayakan merupakan solusi atas permasalahan kepemimpinan di bangsa Indonesia, gereja dan keluarga sebagai unit terkecil dalam organisasi. Sementara Favour C. Uroko dalam artikel jurnalnya yang berjudul *Jethro's Mentoring of Moses (Exodus 18) and its Relevance to the Nigerian Clergy (2020)*<sup>12</sup> menemukan bahwa mentoring pastoral di Nigeria tidak memiliki prinsip-prinsip mentoring Alkitabiah seperti transparansi, pola pikir yang tulus, membantu klerus junior untuk memaksimalkan potensi dan mengembangkan

---

<sup>10</sup> Arti Ekawati, "Indonesia: Corruption Scandals Escalate as Election Nears – DW – 10/18/2023," dw.com, 31 Januari 2024, <https://www.dw.com/en/indonesia-corruption-scandals-escalate-as-election-nears/a-67130795>.

<sup>11</sup> Hergyana Saras Ningtyas dan Sriyati Sriyati, "Refleksi Pemimpin Yang Memberdayakan Berdasarkan Keluaran 18:18-24," *HARVESTER: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen* 6, no. 1 (15 Juni 2021): 22, <https://doi.org/10.52104/harvester.v6i1.58>.

<sup>12</sup> Favour Uroko, "Jethro's Mentoring of Moses (Exodus 18) and Its Relevance to the Nigerian Clergy," *E-Journal of Religious and Theological Studies* 6, no. 2 (Maret 2020): 135, <https://doi.org/10.32051/erats.2020.035>.

keterampilan. Mentoring pastoral dipenuhi kebencian, kesombongan, dan kurangnya transparansi dari pihak mentor dan keengganan untuk dibimbing oleh yang dibimbing sehingga menjadi masalah yang menghambat pelayanan pastoral.

Penulis sependapat dengan para peneliti ini bahwa skandal yang terjadi dalam kepemimpinan bisa terjadi karena buruknya uji kelayakan terhadap calon pemimpin sehingga tampak seperti “politik balas jasa” sebagaimana diteliti Zaenur Rohman terhadap kepemimpinan Jokowi. Kemudian kurangnya mewujudkan pemimpin yang memberdayakan seperti ditekankan oleh Ningtyas dan Sriyati. Permasalahan dalam kepemimpinan juga terjadi karena hilangnya prinsip-prinsip mentoring kepemimpinan bercorak Alkitabiah seperti ditemukan Uroko di Nigeria. Berbeda dari para peneliti ini meskipun mengambil pesan dari penelitian mereka, lewat pembacaan atas pesan Keluaran 18: 21, penulis menemukan bahwa skandal politik yang berulang yang menyeret pemimpin politik di Indonesia disebabkan oleh adanya ketidakselarasan antara idealitas Keluaran 18: 21 dengan kehidupan pemimpin politik. Dengan kata lain, kepemimpinan di Indonesia tidak relevan dengan nilai-nilai kepemimpinan yang ditekankan oleh Keluaran 18: 21. Pemimpin kita mengalami penyimpangan karakter dari kualitas pemimpin politik sebagaimana digarisbawahi oleh Keluaran 18: 21. Menjamurnya skandal pemimpin politik di Indonesia disebabkan oleh lunturnya kualitas kepemimpinan dalam diri seorang politisi.

Kualitas ini mesti menjadi sifat/karakter para politisi Indonesia. Namun karena kualitas ini tergerus maka skandal-skandal politik pun tidak dapat dihindari. Singkatnya, hilangnya kualitas yang digarisbawahi oleh Keluaran 18: 21 ini mesti dipertimbangkan sebagai akar persoalan skandal politik di Indonesia selain kurangnya pemberdayaan, keengganan menghadapi mentoring, dan tidak adanya uji kelayakan sehingga menjadi sekadar “politik balas jasa”. Seorang pemimpin akan kesulitan memberdayakan orang lain demi keberlanjutan kepemimpinan, akan sulit mendengarkan nasihat orang lain (mentoring) jika tidak memiliki kualitas etis apalagi tidak melewati sebuah uji kelayakan dan hanya menduduki jabatan sebagai “hadiah politik.” Kualitas etis sangat berpengaruh bagi kelayakan (kepantasan) menduduki kursi jabatan.

Pada akhirnya, artikel ini diharapkan bisa menjadi pedoman kritis bagi para pemimpin dan pejabat politik terutama dari kalangan Kristen agar sungguh-sungguh menerapkan suatu bentuk kepemimpinan atau pelaksanaan tanggung

jawab jabatan dan pemerintahan yang baik yang di dalamnya mengalir kualitas etis kepemimpinan seperti kapabilitas, spiritualitas, kredibilitas, dan integritas.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam menelaah topik ini adalah penggabungan antara pendekatan analisis literatur dan analisis biblika. Analisis literatur dimaksudkan untuk meneliti berbagai skandal para pemimpin politik di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Berbagai skandal yang dimaksud diperoleh dengan membaca dan mengkaji buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, artikel di media sosial, yang diperoleh secara daring. Setelah membaca dan mengkaji literatur ilmiah daring terkait topik skandal politis, penulis kemudian menganalisis dan mengevaluasi konteks, pesan, dan implikasi dari sejumlah literatur tersebut. Sementara itu, analisis biblika dilakukan dengan pembacaan yang mendalam terhadap teks Keluaran 18: 21, dengan fokus pada makna historis (secara singkat) dan prinsip-prinsip utama mengenai kepemimpinan yang benar atau kepemimpinan yang beretika yang secara implisit terkandung dalam teks Keluaran 18: 21.

Dari hasil kajian literatur atas realitas skandal pemimpin politik dan kajian mendalam terhadap Keluaran Pasal 18 Ayat 21, penulis kemudian berusaha menyintesis kedua sumber utama tersebut untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terutama pesan dan signifikansi yang hendak disampaikan oleh teks Keluaran 18: 21 terkait persoalan skandal politis di Indonesia. Melalui elaborasi dan sintesis tersebut, penulis lalu menarik poin-poin baru yang kemudian menjadi posisi (tesis) tulisan ini sekaligus sebagai potensi sumbangsih tulisan ini. Poin-poin yang ditemukan sekaligus menjadi rujukan bagi penulis untuk merumuskan solusi praktis dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang beretika di masa depan di Indonesia terutama demi mencegah terjadinya skandal yang berulang di dalam kehidupan para pemimpin politik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan mengenai topik ini akan diuraikan dengan melihat realita ruang publik, penjabaran poin-poin penting yang disarikan dari pesan biblika Keluaran

18: 21, signifikansi dan implikasi dari Keluaran 18: 21 terhadap kepemimpinan di Indonesia, dan kemungkinan-kemungkinan untuk mengatasi akar persoalan dibalik ketidakselarasan (ketidakrelevannya) antara idealitas biblikal dan fakta ruang publik kehidupan pemimpin politik di Indonesia.

### ***Skandal yang Melibatkan Pemimpin Politik di Indonesia***

Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir sejak bertransisi dari rezim otoriter ke sistem demokrasi pada 1998. Setelah dua dekade reformasi, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran.<sup>13</sup> Realitas kepemimpinan politik di dalam negara demokrasi ini dapat dikatakan masih jauh dari ideal dan menghadapi tantangan karena sejumlah skandal politik yang terus berulang. Skandal sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan yang memalukan, perbuatan yang menurunkan martabat seseorang.<sup>14</sup> Maka dalam konteks politik dapat diartikan sebagai perbuatan para politisi yang memalukan yang dapat menurunkan martabat mereka sebagai individu. Realita telah menunjukkan sejumlah bentuk skandal yang dilakukan oleh para pemimpin politik atau pejabat publik di Indonesia.

Korupsi dan penggelapan muncul sebagai isu utama. Sejumlah pemimpin politik atau para politisi terlibat dalam pelanggaran keuangan. Artikel Redaksi Kompas pada 22 Desember 2023 menyuarakan keprihatinan terhadap korupsi dengan judul menohok, "Korupsi Lagi, Korupsi Lagi".<sup>15</sup> Keprihatinan ini terkait OTT yang dilakukan KPK terhadap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba atas kasus suap beli jabatan dan proyek pada Desember 2023. Korupsi proyek BTS 4G yang menjerat eks Ketua Menkominfo, Jhonny G. Plate hingga merugikan negara Rp 8 triliun. Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terjerat pemerasan dan tindak pidana pencucian uang selama 2020-2023 dengan nominal dari US\$ 4.000 hingga US\$ 10.000. Catatan *Transparency International* memperlihatkan bahwa dalam lima tahun terakhir *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia mengalami

---

<sup>13</sup> Muhammad Bahrul Ulum, "INDONESIAN DEMOCRACY AND POLITICAL PARTIES AFTER TWENTY YEARS OF REFORMATION: A CONTEXTUAL ANALYSIS," *Indonesia Law Review* 10, no. 1 (30 April 2020): 30, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.577>.

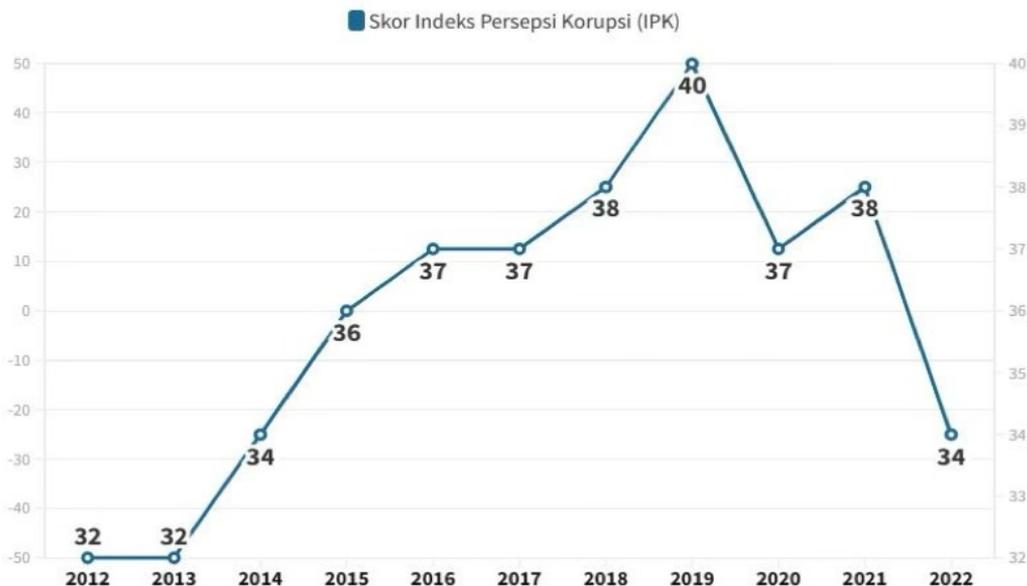
<sup>14</sup> KBBI versi daring. <https://kbbi.web.id/skandal.html>

<sup>15</sup> REDAKSI, "Korupsi Lagi, Korupsi Lagi," [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/21/korupsi-lagi-korupsi-lagi), 21 Desember 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/21/korupsi-lagi-korupsi-lagi>.

kecenderungan turun. Tahun 2019 dengan skor 40 lalu menurun menjadi 34 pada 2022.

Wawan Suyatmiko, Deputi Sekretaris Jenderal *Transparency International Indonesia* mengatakan bahwa CPI Indonesia tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini sama dengan skor CPI 2022. Stagnasi skor CPI tahun 2023 memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan.<sup>16</sup> Berikut skor lengkap IPK Indonesia dari Tahun 2012-2022.

### Indeks persepsi korupsi Indonesia 2012-2022



Sumber: Transparency International



Selain itu, skandal dalam pemilihan umum dan partai politik terus menjamur dalam demokrasi Indonesia. Pergeseran dari pemilu pusat ke pemilu lokal memang bertujuan untuk meningkatkan demokrasi. Namun, tahap ini menghadapi tantangan kritis karena rentan terjebak oleh politik uang. Pemilu di Indonesia

<sup>16</sup> Transparency International Indonesia, "Indeks Persepsi Korupsi: Pemberantasan Korupsi Kembali ke Titik Nol" (30 Januari 2024), <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2023-pemberantasan-korupsi-kembali-ke-titik-nol/>

bermasalah karena menghalangi transaksi modal, yang mengindikasikan adanya masalah serius dalam cara kerja partai politik.<sup>17</sup> Sejatinya keberadaan partai politik (parpol) menjadi krusial bagi bekerjanya mekanisme demokrasi. Parpol menjadi jembatan penghubung politis antara pemilik kekuasaan (rakyat) dengan pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan. Peran sentral parpol dalam demokrasi tak terlepas dari perannya mengkonsolidasikan demokrasi melalui fungsinya-fungsinya. Namun seringkali fungsi-fungsi parpol berjalan dengan tidak baik karena konflik internal sebagai akibat tidak berjalannya mekanisme demokrasi di dalamnya. Beberapa parpol bahkan lahir karena konflik internal yang membuat partai politik sulit untuk dilembagakan hingga ke tingkat akar rumput. Begitu juga dengan partai politik yang seharusnya dapat menyiapkan kader-kader terbaik untuk mengisi jabatan publik, lebih banyak diisi oleh orang-orang yang hanya memiliki modal kekuasaan dan kedekatan dengan pimpinan, sehingga tidak mengherankan jika sumber daya manusia di partai politik dapat dikatakan kurang berkualitas karena meritokrasi atau sistem penjurangan karir tidak berjalan dengan baik.<sup>18</sup> Kondisi ini lalu membuat parpol mudah terjebak ke dalam praktik kotor seperti politik transaksional. Ini semakin menegaskan bahwa politik dan filosofinya sudah terjerembab ke dalam kerakusan, memfokuskan pada usaha mendapatkan kekuasaan, daripada perubahan sosial.<sup>19</sup> Kerakusan inilah menjadi salah satu pendorong politik transaksional. Pada pemilu tahun 2019 Bawaslu mendatkan data mengenai kasus pelanggaran Pemilu yaitu salah satunya politik uang sebanyak 36 kasus yang sudah diputuskan oleh pengadilan.<sup>20</sup> Kasus korupsi ini menunjukkan bahwa penyelewengan jabatan oleh para politisi semakin menggurita. Posisi politik dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi daripada kepentingan rakyat. Korupsi menjadi satu dari sepuluh permasalahan birokrasi di Indonesia yang paling menonjol.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Ulum, "INDONESIAN DEMOCRACY AND POLITICAL PARTIES AFTER TWENTY YEARS OF REFORMATION," 30.

<sup>18</sup> Nico Harjanto, "Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia," Artikel, *Analisis CSIS* 40, no. 2 (2011): 139-141

<sup>19</sup> Reinhold Niebuhr, *Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics* (Westminster John Knox Press, 2013).

<sup>20</sup> Sinta Nurjulaiha, Suryanef, dan Al Rafni, "FENOMENA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PEMILU MENURUT PERSPEKTIF TEORY POLITICAL DEVELOPMENT (STUDI DI PROVINSI JAMBI)," *Jurnal Ilmu Sosial* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 91, <https://doi.org/10.21831/jis.v2i2.10>.

<sup>21</sup> Hardiyanto Rahman, "REFORMASI BIROKRASI: KORUPSI DALAM BIROKRASI INDONESIA,"

Penyalahgunaan kekuasaan muncul sebagai tema umum lainnya, yang ditandai dengan favoritisme, nepotisme, dan penyalahgunaan sumber daya publik. Kasus-kasus ini mempengaruhi hampir semua kegiatan sumber daya manusia dengan perekrutan, promosi, pelatihan, dan pemindahan staf menjadi salah satu yang paling rentan. Risiko jual beli jabatan, menunjuk dan mempromosikan teman, kerabat, dan afiliasi partai, sangat tinggi ketika posisi tersebut dianggap menguntungkan, atau memberikan peluang untuk memperkaya diri sendiri secara tidak sah.<sup>22</sup> Contohnya skandal Mahkamah Konstitusi terkait syarat batas usia capres cawapres yang tendensius karena menguntungkan Gibran. Skandal politik yang menjerat Jokowi karena memegang data intelijen partai politik.

Favoritisme adalah praktik memberikan perlakuan istimewa kepada seseorang, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor objektif seperti keahlian atau kinerja. Di era pemerintahan Jokowi sangat terlihat. Jokowi mengangkat pejabat dari partai-partai pendukung. Koalisi politik dan hubungan personal merupakan faktor utama yang mempengaruhi praktik favoritisme ini. Jenis perilaku ini dapat mengakibatkan nepotisme, dan patronase.

Nepotisme adalah memberikan keuntungan atau jabatan kepada anggota keluarga tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kinerja. Cara ini menciptakan ketidakadilan dan pengabaian terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih baik namun tidak memiliki hubungan personal yang kuat. Pemilu 2024 menunjukkan fenomena ini. Konstitusi negara harus dilanggar demi melanggengkan nafsu berkuasa bercorak dinasti politik. Kehadiran Gibran dalam bursa calon wakil presiden menandakan munculnya dinasti politik baru di negara dengan populasi terpadat keempat di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.<sup>23</sup> Kasus ini menandai perkembangan yang mengkhawatirkan tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara demokrasi berkembang lainnya di Asia Tenggara. Ketika demokrasi di seluruh dunia menghadapi ancaman yang semakin meningkat — termasuk di Amerika Serikat dan Eropa — dunia hampir

---

Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah 14, no. 1 (30 Juni 2022): 150, <https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1.2735>.

<sup>22</sup> "Congress of Local and Regional Authorities of The Council of Europe," 31 Januari 2024, 12, [https://doi.org/10.1163/1570-6664\\_iyb\\_SIM\\_org\\_2284](https://doi.org/10.1163/1570-6664_iyb_SIM_org_2284).

<sup>23</sup> Keith B. Richburg, "Opinion | Southeast Asian Dynasties Are Rising Again. That's Troubling News.," *Washington Post*, 28 November 2023, <https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/28/southeast-asia-political-dynasties-rise/>.

tidak membutuhkan kemunduran demokrasi. Namun, hal ini bisa saja terjadi di Asia Tenggara, di mana demokrasi masih rapuh, dan politik semakin menjadi bisnis keluarga.<sup>24</sup> Patronase terjadi ketika seseorang dipilih untuk mendapatkan pekerjaan atau keuntungan dari pemerintah karena hubungan atau koneksi politik.<sup>25</sup>

Selain itu, kekuasaan sering kali diraih melalui *branding* politis yang tampak menggambarkan citra diri para politisi. Kecenderungan ini sering terjadi menjelang pemilu. Di sini eksploitasi bias kognitif dan penggunaan bahasa yang sarat simbolik demi membangkitkan respons emosional sangatlah kuat. Politisi menggunakan bahasa yang penuh emosi untuk menarik perhatian pemilih. Ruang publik diramaikan oleh berbagai pencitraan politik. Para kandidat melakukan *branding* untuk menjangkau pemilih melalui komunikasi politik yang persuasif dan bermuatan emosional tetapi sering kali melupakan tuntutan moral dan etika. Citra politik seperti “gemoy”, “saatnya yang muda memimpin”, dan atau “hadir, kerja untuk rakyat” menjadi strategi merebut simpatisan politis. Namun tanpa disadari, hal-hal semacam ini berpotensi menimbulkan distorsi fakta dan mengedepankan sensasionalisme daripada jati diri dan pembahasan kebijakan yang substantif.

Skandal-skandal politik di atas memperlihatkan mundurnya etika dan moral pemimpin di dalam dinamika kepemimpinan di tengah laju pembangunan Indonesia yang masif. Kemajuan fisik (infrastruktur) ternyata berjalan beriringan juga dengan mundurnya nilai-nilai (demokrasi) karena ulah para politisi. Karena perilaku politisi hari ini, M. Subhan tak segan mengatakam, “bangsa ini mati di tangan politikus.” Akademisi seperti Rocky Gerung bahkan lebih sarkas mengkritik Jokowi (bukan sebagai pribadi) dengan sebutan “bajingan, tolol.”

### ***Analisis Biblika: Poin-poin dari Keluaran 18: 21***

Siapa itu pemimpin? Bagaimana pemahaman pemimpin dalam pesan Keluaran 18: 21? Kata pemimpin memiliki banyak arti dan interpretasi. Sementara kepemimpinan adalah proses yang kompleks.<sup>26</sup> Kartini Kartono mendefinisikan

---

<sup>24</sup> Richburg.

<sup>25</sup> Haidar Fikri, “The Practices of Political Patronage and Clientelism of the Democrat Party in the 2014 Legislative Election in Ponorogo Regency,” *Jurnal Studi Pemerintahan* 8, no. 4 (2017): 477 <https://doi.org/10.18196/jgp.2017.0056.467-492>.

<sup>26</sup> Joseph Adebomi dkk., “Implications of Moses’ quality leadership in promoting good

pemimpin sebagai “seorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan dalam suatu bidang sehingga dapat memengaruhi orang-orang di sekitar untuk melakukan aktivitas secara bersama-sama demi tujuan yang hendak dicapai.”<sup>27</sup> Sementara kepemimpinan adalah sebuah proses di mana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dan mengarahkan organisasi dengan cara yang membuatnya lebih kohesif dan koheren.<sup>28</sup> Kepemimpinan menjadi efektif ketika para pengikut berhasil dipengaruhi oleh seorang pemimpin untuk mencapai tujuan bersama yang menginspirasi. Perilaku tertentu dari para pemimpin menentukan hasil dari kepemimpinan. Pemimpin harus dapat menggunakan pola perilaku dengan cara yang efektif untuk memengaruhi pengikut secara positif.<sup>29</sup>

Pemahaman pemimpin seperti ini menjadi persoalan tersendiri di dalam dunia hari ini khususnya di Indonesia. Fakta di ruang publik terkait keterlibatan pemimpin dalam berbagai bentuk skandal politik menunjukkan bahwa pemimpin/kepemimpinan sedang dalam permasalahan kronis. Cukup banyak “ditemukan pemimpin yang melanggar etika moral dan agama, tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat, mengabaikan penegakkan hukum, bahkan banyak pemimpin yang melakukan korupsi dan ditangkap KPK.”<sup>30</sup> Maka untuk membangun iklim pemimpin/kepemimpinan yang ideal dalam artian beretika diperlukan nilai-nilai yang dapat menjadi landasan. Pertanyaannya, nilai-nilai seperti apa yang dapat dijadikan landasan? Nilai-nilai tersebut bisa beragam, bisa secara filosofis, teologis, politis, dan maupun sosiologis. Fokus dalam diskusi ini adalah nilai-nilai etis-teologis dari pesan biblika Keluaran 18: 21. Pesan Keluaran 18: 21 kiranya dapat dijadikan rujukan bagi politisi termasuk politisi Kristen dalam dinamika

---

governance in the church,” *Humanus Discourse* 2 (21 Oktober 2022): 10, [https://www.researchgate.net/publication/364608547\\_Implications\\_of\\_Moses'\\_quality\\_leadership\\_in\\_promoting\\_good\\_governance\\_in\\_the\\_church](https://www.researchgate.net/publication/364608547_Implications_of_Moses'_quality_leadership_in_promoting_good_governance_in_the_church).

<sup>27</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan kepemimpinan*, 8 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 38, [https://books.google.com/books/about/Pemimpin\\_dan\\_kepemimpinan.html?hl=id&id=tXC3swEACAAJ](https://books.google.com/books/about/Pemimpin_dan_kepemimpinan.html?hl=id&id=tXC3swEACAAJ).

<sup>28</sup> Peter G. Northouse, *Leadership: Theory and Practice*, 3rd Edition (California, USA: SAGE, 2010).

<sup>29</sup> Jon P. Howell dan Dan L. Costley, *Understanding Behaviors for Effective Leadership*, 2nd Edition (New Jersey, USA: Prentice Hall, 2001).

<sup>30</sup> M. Naudi Nurdika, “Menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis Yang Kredibel Guna Mewujudkan Indonesia Maju,” *Jurnal Lemhannas RI* 7, no. 2 (2019): 14, <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.68>.

kepemimpinan mereka. Keluaran 18: 21 dengan sangat tajam menarasikan nilai/kualitas yang harus dimiliki seorang (calon) pemimpin politik.

Konteks awal Keluaran, yang menjadi sumber ayat ini, menceritakan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan perjalanan mereka menuju Tanah Perjanjian. Dalam Keluaran 18, ayah mertua Musa, Yitro, mengunjunginya dan mengamati tugas yang berat dalam mengatur umat. Menurut George W. Coats, Yitro menegur Musa karena kepemimpinan Musa disebut prosedur administrasi yang buruk.<sup>31</sup> Menyadari beban yang ditanggung Musa, Yitro menasihatinya untuk menunjuk para pemimpin yang cakap untuk berbagi beban dalam menghakimi bangsa itu, mengakui karakter moral dan komitmen mereka terhadap keadilan. Secara khusus Keluaran 18: 21 yang diangkat dalam diskusi ini, Yitro menasihati Musa untuk memilih para pemimpin yang memiliki beberapa kualitas utama. Keluaran 18: 21 menarasikan demikian.

“Di samping itu pilihlah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang.”

Teks Keluaran 18: 21 ini mengandung beberapa poin krusial terkait pemimpin atau kepemimpinan. Kata “pilihlah” (bahasa Ibrani, *chazah*) yang mengawali ayat 21 ini diterjemahkan sebagai “mencari dengan teliti.” Septuaginta (LXX) menerjemahkan *chazah* dengan *skeptomai* yang berarti “melihat dengan teliti”, “memeriksa”, “memikirkan terlebih dahulu”.<sup>32</sup> Semua makna ini memberikan pengertian yang baik tentang apa yang diperintahkan Yitro kepada Musa. Musa harus mencari dengan cermat orang-orang yang memenuhi syarat yang dapat membantu dalam tugas ini. Kata *chazah* juga diartikan dengan menatap, secara mental melihat (biasanya setelah meluangkan waktu untuk merenung).<sup>33</sup> Kata ini juga merujuk pada beberapa pengertian yang mengandung karakter yang baik. Kata *chazah* mengacu pada melihat Allah (Kel. 24:11, Ayb. 19:26, 27, Mzm. 11:7), penglihatan dan wawasan kenabian (Yes. 1:1, Yes. 2:1, Yes. 13:1, Rat. 2:14; Yeh.

---

<sup>31</sup> George W. Coats, *Exodus 1-18*, 1st Edition, vol. IIA, 1999 (Michigan, USA: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1998).

<sup>32</sup> Precept Austin, “Exodus 18 Commentary | Precept Austin,” 31 Januari 2024, <https://www.preceptaustin.org/exodus-18-commentary#18:21>.

<sup>33</sup> Austin.

12:27, Zak. 10:2). Keluaran 18: 21 juga menunjukkan kualitas khusus yang diberikan oleh Yitro kepada Musa dalam hal memilih pemimpin-pemimpin baru yang akan membantu Musa. Kualitas-kualitas khusus yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, "orang yang cakap" atau memiliki kemampuan. Kata "cakap" (*able man*) sendiri diturunkan dari bahasa Ibrani, *anshe khayil*, yang menggambarkan orang yang memiliki kemampuan/kapabilitas (*capable man*). James Strong dalam Oddeng (2021) mengartikan kata "cakap" sebagai kekuatan, kekayaan, kebajikan, keberanian, kesalehan.<sup>34</sup> Pengertian ini dapat pula berkonotasi pada seorang pejuang, seorang kaya, atau warga negara yang dihormati dan memiliki pengaruh sosial (Propp, 1990).<sup>35</sup> Kata "cakap" juga bermakna "orang yang gagah perkasa." Ini menggambarkan karakter sebagai orang-orang yang dihormati dan berpengaruh, mereka yang dipandang oleh masyarakat sebagai pemimpin, dan mereka yang akan memikirkan kebutuhan masyarakat. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki kecakapan yang bukan hanya secara intelektual tetapi juga kekuatan-kekuatan yang dapat mengukuhkan legitimasi dan posisi tawar politik yang baik.

Kedua, "takut akan Allah" (*fear of God*). Kata "takut" sendiri diartikan dari kata Ibrani, *yare*, yang berarti takut (*fearing*), hormat/takzim (*reverent*), ketakutan (*afraid*). Dalam konteks ayat 21, kata "takut" diikuti dengan kata "akan Allah". Hal ini dengan tegas menunjukkan bahwa rasa takut yang dimaksud menyiratkan rasa hormat kepada Allah. Dalam Septuaginta (LXX), digunakan kata *theosebeis*, yang bermakna "rasa takut kepada Allah."<sup>36</sup> Di dalam 1 Timoteus 2: 10 ditemukan kata *theosebia* yang diartikan sebagai "beribadah". Dalam Yohanes 9: 31 ditemukan kata *theosebeis* yang diartikan sebagai "yang saleh". Dengan demikian, individu yang "takut akan Allah" di sini dapat dimaknai sebagai mereka yang memiliki kesalehan hidup yang di dalamnya terkandung sikap hormat (takzim), saleh, beribadah, dan taat kepada Allah. Memiliki kehidupan spiritualitas yang baik. Sikap-sikap yang mengarah pada Allah juga menyiratkan adanya kepekaan yang mendalam terhadap prinsip-

---

<sup>34</sup> Zulkifli Oddeng dan Wilayanto Wilayanto, "POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA ABSOLUTISME BERTINGKAT NORMAN L. GEISLER DAN KELUARAN 18:21," *Jurnal Misioner* 1, no. 1 (18 Maret 2021): 88, <https://doi.org/10.51770/jm.v1i1.8>.

<sup>35</sup> Oddeng dan Wilayanto, "POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA ABSOLUTISME BERTINGKAT NORMAN L. GEISLER DAN KELUARAN 18."

<sup>36</sup> Hasan Sutanto, *Hermeneutik: prinsip dan metode penafsiran alkitab*, Revisi 2007 (Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2007).

prinsip moral dan etika, yang dipandu oleh rasa pertanggungjawaban kepada kekuatan yang lebih tinggi, Allah. Kualitas-kualitas ini secara mendalam memberi ketegasan bahwa “orang yang profan dan tidak religius selalu tidak cocok berada di tempat otoritas mana pun, terutama di lembaga peradilan”.<sup>37</sup> Ketika peradilan suatu negara telah dirusak melalui penunjukan hakim-hakim yang tidak bermoral, tidak jujur, serakah, dan tidak adil, maka negara itu tidak akan dapat bertahan lama.

Ketiga, orang yang dapat dipercaya. Menurut Strong (1990) frasa “orang yang dapat dipercaya” ini diterjemahkan dari kata, *anshe ‘emeth*, yang artinya, keteguhan (*firmness*), kesetiaan (*faithfulness*), benar, dalam kebenaran (*truth, in truth, trully*). Frasa “orang yang dapat dipercaya” selaras maknanya dengan orang yang mencari kebenaran. Kata “kebenaran” mencakup gagasan tentang kesetiaan atau keandalan, serta faktualitas itu sendiri. Kata ini dapat dipahami sebagai “orang-orang yang jujur”, orang-orang yang perkataannya dapat diandalkan dan benar. Kata *emeth* sendiri berasal dari kata kerja aman yang berarti membenarkan, mendukung, percaya, setia. Hidup dalam kebenaran berarti berperilaku sesuai dengan standar-standar Allah yang kudus (1Ki. 2:4; 3:6; Mzm. 86:11; Yes. 38:3). Kebenaran adalah ukuran dari perkataan seseorang (1Ki. 22:16; Da. 11:2) dan tindakannya (Ge. 24:49; Yos. 2:14). Hasan Sutanto mengatakan bahwa LXX (Septuaginta) menerangkan substansi “orang yang dapat dipercaya” dengan menggunakan terminologi *dikaious* yang berarti benar, adil, hubungan yang benar.<sup>38</sup> Rangkaian pengertian ini menunjukkan bahwa kualifikasi “dapat dipercaya” merujuk pada karakter benar, teguh, jujur, meyakinkan, dapat diandalkan, dan juga setia (kredibilitas).<sup>39</sup> Untuk itu, para pemimpin harus jujur, dapat diandalkan, dan transparan dalam tindakan mereka, menumbuhkan kepercayaan di antara orang-orang yang mereka layani.

Keempat, “benci pada pengejaran suap”. “Pengejaran suap” diterjemahkan dari kata *betsa*. Alkitab terutama King James Version (KJV) menerjemahkan *betsa* dengan kata *covetousness*. Kata *covetousness* memiliki arti ketamakan, keuntungan

---

<sup>37</sup> Exodus 18 - Coffman's Commentaries on the Bible - Bible Commentaries," StudyLight.org, 31 Januari 2024, <https://www.studylight.org/commentaries/eng/bcc/exodus-18.html>.

<sup>38</sup> Sutanto, *Hermeneutik*.

<sup>39</sup> Oddeng dan Wilayanto, “POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA ABSOLUTISME BERTINGKAT NORMAN L. GEISLER DAN KELUARAN 18,” 18.

(tidak jujur), laba (yang diperoleh dengan kekerasan). Kata *covetousness* juga dapat ditemukan dalam Markus 7: 22, diartikan sebagai “keserakahan”. Lukas 12: 15 menerjemahkannya sebagai “ketamakan”. Roma 1:29 mengartikannya sebagai “keserakahan.” Dengan begitu dapat dikatakan bahwa persyaratan lain untuk menjadi pemimpin adalah memiliki integritas dalam artian keteguhan untuk tidak tergoda untuk menjadi tamak atau serakah. Pemimpin dilarang mengejar suap sebab seperti dalam Keluaran 23: 8 dan Ulangan 16: 19 disebutkan bahwa suap membuat orang memutarbalikkan perkataan yang benar. Pemimpin harus secara aktif menolak korupsi dan penyyuapan, memastikan bahwa keputusan mereka tidak dipengaruhi oleh keuntungan pribadi atau tekanan eksternal. Integritas untuk menjauhi politik uang diuji. Politik uang mengatakan jika akar praktik tersebut tidak hanya dimensi politis melainkan juga ambisi yang ditunggangi ketamakan untuk memperoleh kekuasaan.

Dalam Keluaran 18: 21 terdapat frasa “menjadi pemimpin seribu orang, pemimpin seratus orang, pemimpin lima puluh orang dan pemimpin sepuluh orang”. Di sini terlihat pentingnya menunjuk pejabat daripada ribuan, ratusan, lima puluhan, dan puluhan. Struktur ini mendorong sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, memastikan bahwa kekuasaan didistribusikan di antara para pemimpin yang cakap, yang takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan membenci pengejaran suap di berbagai tingkatan. Kualitas-kualitas yang disarankan oleh Yitro kepada Musa ini adalah inti dari efektivitas seorang pemimpin. Dengan demikian, pengertian pemimpin dalam konteks Keluaran 18: 21 adalah seorang yang memiliki kualitas etis yang terdiri atas kapabilitas, spiritualitas, kredibilitas, dan integritas. Pengertian ini signifikan dengan diskusi tentang kepemimpinan politik di Indonesia. Dalam arti, kualitas-kualitas etis ini menjadi problem bagi para politikus di negara ini.

### ***Signifikansi dan Implikasi***

Skandal berulang yang melibatkan para pemimpin politik di Indonesia menunjukkan penyimpangan dari kualitas yang diuraikan dalam Keluaran 18: 21. Korupsi, penggelapan uang, dan penyalahgunaan kekuasaan telah mengikis kepercayaan publik dan menghambat kemajuan bangsa. Sintesis antara fakta ruang publik dan Keluaran 18: 21 menemukan bahwa akar skandal politik seperti korupsi, politik uang dalam pemilu, favoritisme, nepotisme, patronase,

kronisme, dan penyalahgunaan sumber daya publik adalah hilangnya pemimpin/kepemimpinan yang etis. Pemimpin yang memiliki kualitas seperti kapabilitas, spiritualitas, kredibilitas, dan integritas. Dalam iklim politik Indonesia hari ini, pentingnya kualitas-kualitas ini tidak dapat diremehkan.

Scott Grant menegaskan “dalam memilih pemimpin saat ini, sering kali kualitas-kualitas ini tidak berada di urutan teratas dalam daftar. Orang mudah terkesan dengan kilatan dan citra serta kepribadian, yang dapat dilihat sekilas. Tetapi kompetensi yang sejati, rasa hormat yang sejati kepada Tuhan dan integritas sering kali tidak mudah terlihat.”<sup>40</sup> Ini yang terjadi dalam dinamika politik Indonesia. Dengan kata lain, anjuran Yitro kepada Musa untuk “memilih” (mencari dengan teliti, memeriksa, memikirkan terlebih dahulu, merenungkan) calon pemimpin diabaikan dalam konteks kepemimpinan politik di Indonesia. Kualitas-kualitas etis dibungkam dengan cara pemilihan yang condong mempertimbangkan uang, nepotisme, favoritisme, patronase, kronisme, dan atau balas jada. Dampaknya terlihat, para pemimpin politik rentan terjebak ke dalam skandal-skandal politik.

Pernyataan Grant sejalan dengan Zaenur Rohman (peneliti dari Pukat UGM) bahwa skandal-skandal yang terjadi belakangan ini bisa menjadi indikator buruknya uji kelayakan dalam proses perekrutan calon menteri terutama di era Jokowi. Tak ada proses untuk menilai rekam jejak, latar belakang, dan kepemimpinan calon menteri sehingga tampak seperti “politik balas jasa” dari Jokowi kepada partai-partai pendukung. Maka dengan kualitas yang jauh dari prinsip-prinsip etis, sistem desentralisasi kepemimpinan seperti dikatakan dalam Keluaran 18: 21 tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak berbasis pada kualitas-kualitas etis. Harapan pada upaya pemberdayaan pemimpin sebagaimana ditekankan oleh Ningtyas dan Sriyati akan sulit dipraktikkan. Sekalipun dipaksakan, hanya akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang minus etika dan moralitas. Bahkan upaya pemberdayaan melalui proses “mentoring” seperti kata Uroko hanya akan menghasilkan karakter pemimpin dengan kualitas yang jauh dari nilai-nilai etik dan moral. Maka dalam konteks pesan Keluaran 18: 21, pemimpin politik dalam negara demokrasi ini bertumbuh tanpa kualitas etis. Dengan kata lain skandal politik yang masif di dalam negeri telah melibatkan para pemimpin yang tidak memiliki perilaku yang cakap (memiliki kapabilitas), yang takut akan Tuhan (memiliki spiritualitas), yang dapat dipercaya (memiliki kredibilitas) dan yang

---

<sup>40</sup> Austin, “Exodus 18 Commentary | Precept Austin.”

membenci pengejaran suap (memiliki integritas). Sebaliknya, dengan menerapkan kualitas-kualitas etis atau konsep kepemimpinan Alkitabiah (Keluaran 18: 21), politik Indonesia dapat menghasilkan kepemimpinan yang lebih efektif, menciptakan sistem checks and balances sehingga mengurangi risiko seorang individu mengejar banyak kekuasaan, yang dapat mendorong potensi skandal atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, masyarakat Indonesia terutama para elit politik yang terinspirasi oleh Keluaran 18: 21, perlu menuntut diri sendiri untuk memiliki kualitas-kualitas etis seperti cakap (kapabilitas), takut akan Tuhan (spiritualitas) dapat dipercaya (kredibilitas), dan menentang suap (integritas). Kepemimpinan yang etis sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik, memperbaiki sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, para pemimpin politik dapat berkontribusi pada kesejahteraan bangsa dan memastikan masa depan yang cerah bagi Indonesia, dan tidak akan terjebak lagi dalam skandal politik. Temuan-temuan analisis fakta di ruang publik juga menyoroti pentingnya mengatasi perilaku skandal para pemimpin politik yang terus berulang di Indonesia.

Sementara dengan menyoroti signifikansi Keluaran 18: 21, para pemimpin politik dapat memperoleh wawasan mengenai pemerintahan yang efektif, akuntabilitas, dan integritas. Menerapkan prinsip-prinsip ini dapat membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat dan bergerak menuju iklim politik yang lebih berbasis etika. Dengan kata lain, implikasi dari Keluaran 18: 21 dapat menjadi kerangka kerja untuk mencegah skandal politik di Indonesia. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menunjuk pejabat dapat memprioritaskan pemilihan kandidat berdasarkan kompetensi dan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip etika kepemimpinan yaitu cakap (kapabilitas), takut akan Tuhan (spiritualitas) dapat dipercaya (kredibilitas), dan menentang suap (integritas). Karena itu harus diterapkan kualifikasi yang ketat, pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh, dan mengedepankan budaya transparansi selama proses seleksi. Pertimbangan tentang karakter moral, kompetensi, dan dedikasi terhadap pelayanan publik selain *checks and balances* yang efektif diperlukan. Langkah-langkah ini dapat menjamin lahirnya pejabat yang memprioritaskan kesejahteraan publik di atas keuntungan pribadi, sehingga mengurangi frekuensi dan dampak skandal politik. Dengan kata lain, memilih pemimpin Indonesia yang

memiliki kualitas Alkitabiah khususnya selaras dengan sifat-sifat kepemimpinan menurut Keluaran 18: 21 berarti menumbuhkan pemerintah yang efektif di masa depan.

### ***Dampak Skandal dan Langkah Praktis***

Skandal selalu mempengaruhi proses politik dengan berbagai cara dan pada tingkat yang berbeda. Skandal dapat mempengaruhi perilaku politik warga negara.<sup>41</sup> Pertama, terjadinya erosi kepercayaan. Skandal politik sering kali mengikis kepercayaan publik terhadap individu-individu tertentu dan seluruh sistem politik. Ketika para pemimpin terungkap tidak jujur atau korup (tidak memiliki integritas) warga negara dapat kehilangan kepercayaan terhadap mekanisme demokrasi yang membentuk fondasi masyarakat yang fungsional. Skandal dapat secara signifikan mempengaruhi kepuasan warga negara terhadap demokrasi dan kepercayaan mereka terhadap proses politik.<sup>42</sup> Kata lain, skandal dapat merusak demokrasi, menyebabkan kekecewaan dan sikap apatis di antara para pemilih, yang mengarah pada penurunan partisipasi dalam proses politik karena warga negara menarik diri dari proses politik.<sup>43</sup>

Ketika warga negara menganggap pemimpin tidak dapat dipercaya (tidak memiliki kredibilitas) kemungkinan untuk tidak terlibat dalam tugas-tugas kewarganegaraan seperti memberikan suara atau mencalonkan diri untuk jabatan tertentu akan meluas. Sebaliknya, skandal dapat memengaruhi partisipasi pemilih dengan cara yang berlawanan, yaitu dengan memobilisasi suara untuk lawan politisi yang terlibat dalam skandal. Artinya, pemilih dimobilisasi dan dimotivasi untuk memilih kandidat politik alternatif untuk meminta pertanggungjawaban

---

<sup>41</sup> Christian von Sikorski, Johannes Knoll, dan Jörg Matthes, "A New Look at Celebrity Endorsements in Politics: Investigating the Impact of Scandalous Celebrity Endorsers and Politicians' Best Responses," *Media Psychology* 21, no. 3 (3 Juli 2018): 403–36, <https://doi.org/10.1080/15213269.2017.1378109>.

<sup>42</sup> Sigurd Allern dan Christian von Sikorski, "Political Scandals as a Democratic Challenge: From Important Revelations to Provocations, Trivialities, and Neglect — Introduction," *International Journal of Communication* 12, no. 0 (6 Agustus 2018): 3014–3023, <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/7094>.

<sup>43</sup> Iberto Chong dkk., "Does Corruption Information Inspire the Fight or Quash the Hope? A Field Experiment in Mexico on Voter Turnout, Choice, and Party Identification," *The Journal of Politics* 77, no. 1 (Januari 2015): 55–71, <https://doi.org/10.1086/678766>.

para aktor yang terlibat dalam skandal.<sup>44</sup>

Kedua, konsekuensi sosial. Skandal politik dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap masyarakat, menumbuhkan “skeptisisme terhadap elit politik secara keseluruhan yang mempengaruhi citra semua partai politik.”<sup>45</sup> Selain itu dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, rusaknya hubungan internasional, dan meningkatnya perpecahan sosial. Konsekuensi-konsekuensi ini menekankan potensi dampak skandal yang luas di luar individu-individu yang terlibat.

Ketiga, dalam bingkai Keluaran 18: 21, skandal politik di Indonesia terjadi karena pengabaian terhadap kehidupan religius spiritual berbasis kitab suci. Tidak ada relevansi antara sifat-sifat pemimpin Keluaran 18: 21 dengan praksis hidup politisi Indonesia terutama para politisi atau pejabat publik di Indonesia merupakan kaum beragama. Agama-agama tentu mengajarkan etika dan moralitas yang mesti dijunjung oleh penganutnya. Sehingga dalam bingkai Keluaran 18: 21 terlihat jelas bahwa para pejabat publik Indonesia mengalami penyimpangan, ketidakselarasan, dan hidupnya tidak sesuai dengan satu dari sifat-sifat kepemimpinan etis yaitu takut akan Tuhan (spiritualitas). Mestinya bagi seorang politisi yang beragama, moral tertinggi adalah Allah. Ketika politisi telah kehilangan spiritualitas (tidak takut pada Allah) berarti kehilangan moral tertinggi. Kehilangan ini berimplikasi pada pengabaian nilai-nilai lainnya yaitu cakap (kapabilitas), dapat dipercaya (kredibilitas), dan menentang suap (integritas).

Sikap etis Musa sebagaimana tersirat dalam Keluaran 18: 21 memberinya kompas moral, sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk menavigasi jalannya melalui isu-isu yang sangat sulit.<sup>46</sup> Kompas moral inilah amat penting bagi para pemimpin politik Indonesia terutama berkenaan dengan individu-individu yang terlibat dalam skandal politik. Kompas moral ini sendiri termaktub dalam keempat kualitas etis berserta makna turunannya. Seseorang pemimpin harus memiliki sikap yang cakap (kredibilitas). Artinya di dalam dirinya juga harus

---

<sup>44</sup> Allern dan Sikorski, “Political Scandals as a Democratic Challenge,” 3017–18.

<sup>45</sup> Jürgen Maier, “The Impact of Political Scandals on Political Support: An Experimental Test of Two Theories,” *International Political Science Review* 32, no. 3 (Juni 2011): 283–302, <https://doi.org/10.1177/0192512110378056>.

<sup>46</sup> Adebomi dkk., “Implications of Moses’ quality leadership in promoting good governance in the church.”

mengalir kekuatan, kebajikan, keberanian, dan kesalehan. Ia juga memiliki sikap yang takut akan Tuhan (spiritualitas) yang mencakup sikap hormat/takzim, saleh, beribadah, dan taat kepada Allah. Ia harus menghidupi sikap yang dapat dipercaya (kredibilitas) yang mencakup jujur, dapat diandalkan, transparan, setia, dan benar. Ia benci pengejaran suap (integritas) yang berarti ia tidak serakah atau tidak tamak. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana membangun kualitas-kualitas etis ini di dalam diri para pemimpin politik, pejabat publik, (bahkan pemimpin agama) di Indonesia? Menumbuhkan kualitas-kualitas etis untuk menangkai skandal-skandal di masa depan, beberapa langkah praktis dapat ditempuh.

Pertama, memperkuat tindakan anti-korupsi. Pemerintah harus memperkuat lembaga-lembaga anti-korupsi yang sudah ada, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan memberikan lebih banyak sumber daya, independensi, dan wewenang. Penegakan hukum lebih tegas sangat penting untuk memerangi korupsi. Sebab politisi yang korup dan sistem politik yang korup di Indonesia memiliki dampak yang parah terhadap mata pencaharian masyarakat, korupsi menyebabkan kemiskinan, pengangguran, dan menciptakan kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya.<sup>1</sup>

Kedua, mempromosikan kepemimpinan yang beretika. Partai politik harus memprioritaskan pemilihan kandidat dengan rekam jejak yang terbukti dalam hal perilaku etis dan integritas. Menerapkan proses pemeriksaan yang lebih ketat tentang kandidat sekaligus menghindari "*money politics*" dalam promosi kandidat. Partai politik dapat membantu memastikan bahwa hanya individu yang berkomitmen untuk melayani kepentingan publik yang terpilih.

Ketiga, berinvestasi dalam program pendidikan kewarganegaraan dapat memberdayakan warga negara. Dengan mendidik warga tentang hak-hak mereka, tanggung jawab, dan pentingnya meminta pertanggungjawaban para pemimpin, warga negara dapat menjadi lebih terlibat dalam membentuk lanskap politik. Tujuannya ialah agar warga negara memiliki pemahaman memadai tentang Negara, dalam konteks Indonesia berhubungan dengan pengetahuan tentang demokrasi (Pancasila), dan melek dalam politik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Laode M. Syarif, "Addressing the Root of Political Corruption in Indonesia", *Integritas* 5, no. 2 (2019): 195, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2>.

<sup>2</sup> Hubertus Herianto dan Robertus Wijanarko, "Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia," *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 1 (27 April 2022): 53-64, <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.39581>.

Terakhir, membangun “pendidikan rumah” yang kuat. Karakter harus dibangun sejak dari rumah terutama yang berbasis agama. Dan dalam hal ini menghidupkan ajaran-ajaran iman melalui Kitab Suci. Dengan begitu, bibit-bibit politisi di masa depan yang memiliki kualitas etis dipersiapkan sejak dari rumah. George Barna mengatakan bahwa nilai dan pandangan hidup dalam sebuah masyarakat yang sehat terbentuk dari pilihan-pilihan keluarga dalam rutinitas keseharian mereka. Baik atau buruk, keluarga tetaplah ruang pembentukan moral dan sumber daya manusia.<sup>3</sup> Keluarga telah memiliki pengaruh yang kuat pada masyarakat. Banyak dari masalah sosial besar hari ini mencerminkan nilai-nilai dan kualitas kehidupan keluarga. Nilai tradisional seperti takut akan Tuhan, menghormati otoritas, standar perilaku moral, mengajarkan tentang benar dan salah, tidak curang dan berdusta, dan sebagainya adalah nilai-nilai yang seharusnya dikomunikasikan kepada anak-anak dari orang tua mereka dalam lingkungan rumah”.<sup>4</sup> Langkah-langkah praktis ini tentu menjadi alternatif reformasi budaya politik Indonesia agar politik jauh dari skandal. Keluaran 18: 21 memberikan wawasan yang berharga untuk melawan skandal politik di zaman modern terutama di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Skandal para pemimpin politik memiliki signifikansi penting dalam masyarakat saat ini, seperti yang terlihat melalui lensa Keluaran 18: 21. Dalam arti bahwa melalui kualitas-kualitas yang diuraikan dalam ayat tersebut, yaitu cakap (kapabilitas), takut akan Tuhan (spiritualitas), dapat dipercaya (kredibilitas), dan tidak suka mendapatkan keuntungan yang tidak jujur (integritas) dapat berfungsi sebagai kompas untuk kepemimpinan yang efektif. Nilai-nilai ini menentukan kualitas kepemimpinan yang kemudian dapat disebut kepemimpinan beretika. Nilai-nilai tersebut secara implisit diingatkan Keluaran 18: 21, dan menurut hemat penulis merupakan kualitas etis yang mesti dimiliki pemimpin Indonesia. Maka menyoroti pemimpin di Indonesia dalam arti sebenarnya bermakna pemimpin tersebut memiliki nilai/kualitas/sifat-sifat yang cakap, yang takut akan Tuhan,

---

<sup>3</sup> George Barna, *The Second Coming of the Church* (California, USA: Thomas Nelson Inc, 1998), 190.

<sup>4</sup> Sapto Sunariyanti, “Penerapan Etika Kristen dalam Pendidikan Anti Korupsi di Keluarga,” *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI* 7, no. 1 (2018): 115, <https://doi.org/10.46495/sdjt.v7i1.46>.

yang dapat dipercaya, dan yang berani menolak siap. Dengan memasukkan nilai/kualitas/sifat ini ke dalam pemilihan dan evaluasi para pemimpin, masyarakat dapat bekerja untuk memulihkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik dan mendorong lanskap politik yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Meskipun demikian, menerapkan ajaran Alkitab pada kepemimpinan politik di Indonesia bisa dianggap bersifat subjektif bahkan sekaligus memperlihatkan sisi keterbatasan penelitian mengingat kompleksitas dinamika politik Indonesia sehingga perlunya penelitian lebih lanjut untuk memastikan cakupan penuh dari hubungan antara Keluaran 18: 21 dan kepemimpinan politik di Indonesia terutama berhubungan dengan skandal-skandal politik yang terus menjamur. Realitas skandal para pemimpin di Indonesia menimbulkan tantangan besar bagi lanskap sosio-politik negara ini. Dengan analisis literatur dan analisis Alkitab, eksplorasi signifikansi Keluaran 18: 21 terhadap skandal yang berulang, kita dapat menyoroti prinsip-prinsip utama kepemimpinan etis, menjadi peluang perbaikan dan reformasi birokrasi demi perjalanan demokrasi yang bermartabat. Hikmah dari pesan Keluaran 18: 21 dan berbagai fakta ruang publik Indonesia beberapa tahun terakhir, para pemimpin politik dapat termotivasi membangun sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel, membangun kembali kepercayaan masyarakat, dan pada akhirnya meletakkan landasan bagi kemajuan bangsa, kesejahteraan bersama sebagai bangsa, dan sebagai masyarakat Allah.

Dengan memilih pemimpin yang memiliki kapabilitas, spiritualitas, kredibilitas, dan integritas berarti warga bangsa berkomitmen mengembangkan tata kelola pemerintahan dan kehidupan politik secara beretika, di tingkat pusat maupun di daerah. Dengan kata lain, pesan Keluaran 18: 21 perihal kualitas-kualitas etis yang harus dimiliki pemimpin sangat krusial dan dapat dijadikan semacam “tanggung jawab komunitarian”<sup>5</sup> dalam berindonesia dalam perjalanannya menuju sebuah bangsa yang bebas dari berbagai bentuk skandal politik di masa depan.

Saran ke depannya adalah perlunya sanksi tegas berupa pemecatan kepada pejabat yang terlibat skandal dan memasukan mereka ke “daftar hitam” negara sehingga tidak berkesempatan lagi untuk bekerja di dalam lingkup pemerintahan di level manapun. Bagi umat Kristiani yang terpanggil untuk berkarir di bidang politik, kesempatan tersebut harus menjadi peluang menaburkan semangat

---

<sup>5</sup> Paul Sciberras, “Jethro and Moses in Dialogue (Exodus 18: 8–26): Ethics of Communitarian Responsibility,” *Religions* 14, no. 5 (Mei 2023): 587, <https://doi.org/10.3390/rel14050587>.

kepemimpinan Alkitabiah. Dengan demikian, politik dapat menjadi ruang yang memberi “terang dan garam” bagi banyak orang. Namun pejabat Kristen pun harus berani dan lapang dada menerima konsekuensi tegas apabila terjadi penyimpangan dalam tugas kepemimpinannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Barna, George. *The Second Coming of the Church*. California, USA: Thomas Nelson Inc, 1998.
- Coats, George W. *Exodus 1-18*. 1st Edition. Vol. IIA. 1999. Michigan, USA: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1998.
- Howell, Jon P., dan Dan L. Costley. *Understanding Behaviors for Effective Leadership*. 2nd Edition. New Jersey, USA: Prentice Hall, 2001.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan kepemimpinan*. 8 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Markovits, Andrei S., dan Mark Silverstein. *The Politics of Scandal: Power and Process in Liberal Democracies*. Holmes & Meier, 1988
- Niebuhr, Reinhold. *Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics*. Westminster John Knox Press, 2013.
- Northouse, Peter G. *Leadership: Theory and Practice*. 3rd Edition. California, USA: SAGE, 2010.
- Rottinghaus, Brandon. *The Institutional Effects of Executive Scandals*. Cambridge University Press, 2015.
- Sutanto, Hasan. *Hermeneutik: prinsip dan metode penafsiran alkitab*. Revisi 2007. Malang: Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2007.

## **Jurnal**

- Allern, Sigurd, dan Christian von Sikorski. "Political Scandals as a Democratic Challenge: From Important Revelations to Provocations, Trivialities, and Neglect — Introduction." *International Journal of Communication* 12, no. 0 (6 Agustus 2018): 10. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/7094>.
- Chong, Alberto, Ana L. De La O, Dean Karlan, dan Leonard Wantchekon. "Does Corruption Information Inspire the Fight or Quash the Hope? A Field Experiment in Mexico on Voter Turnout, Choice, and Party Identification." *The Journal of Politics* 77, no. 1 (Januari 2015): 55–71. <https://doi.org/10.1086/678766>.
- Dziuda, Wioletta, dan William G. Howell. "Political Scandal: A Theory." *American Journal of Political Science* 65, no. 1 (2021): 197–209. <https://doi.org/10.1111/ajps.12568>.
- Fikri, Haidar. "The Practices of Political Patronage and Clientelism of the Democrat Party in the 2014 Legislative Election in Ponorogo Regency." *Jurnal Studi Pemerintahan* 8, no. 4 (2017). <https://doi.org/10.18196/jgp.2017.0056.467-492>.
- Herianto, Hubertus, dan Robertus Wijanarko. "Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia." *Jurnal Filsafat Indonesia* 5, no. 1 (27 April 2022): 53–64. <https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.39581>.
- Maier, Jürgen. "The Impact of Political Scandals on Political Support: An Experimental Test of Two Theories." *International Political Science Review* 32, no. 3 (Juni 2011): 283–302. <https://doi.org/10.1177/0192512110378056>.
- Ningtyas, Hergyana Saras, dan Sriyati Sriyati. "Refleksi Pemimpin Yang Memberdayakan Berdasarkan Keluaran 18:18-24." *HARVESTER: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen* 6, no. 1 (15 Juni 2021): 20–37. <https://doi.org/10.52104/harvester.v6i1.58>.
- Nurdika, M. Naudi. "Menyiapkan Pemimpin Tingkat Strategis Yang Kredibel Guna Mewujudkan Indonesia Maju." *Jurnal Lemhannas RI* 7, no. 2 (2019): 13–19. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i2.68>.

- Nurjulaiha, Sinta, Suryanef, dan Al Rafni. "FENOMENA POLITIK UANG (MONEY POLITIC) PADA PEMILU MENURUT PERSPEKTIF TEORY POLITICAL DEVELOPMENT (STUDI DI PROVINSI JAMBI)." *Jurnal Ilmu Sosial 2*, no. 2 (20 Desember 2022): 90–99. <https://doi.org/10.21831/jis.v2i2.10>.
- Oddeng, Zulkifli, dan Wilayanto Wilayanto. "POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA ABSOLUTISME BERTINGKAT NORMAN L. GEISLER DAN KELUARAN 18:21." *Jurnal Misioner 1*, no. 1 (18 Maret 2021): 77–98. <https://doi.org/10.51770/jm.v1i1.8>.
- Rahma politik n, Hardiyanto. "REFORMASI BIROKRASI: KORUPSI DALAM BIROKRASI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah 14*, no. 1 (30 Juni 2022): 135–61. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1.2735>.
- Rajab, Achmadudin. "PERAN PENTING BADAN KEAHLIAN DPR RI DALAM SISTEM HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENDUKUNG TERWUJUDNYA Keadilan Untuk Kedamaian." *Jurnal Legislasi Indonesia 14*, no. 2 (3 Mei 2018): 233–43. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i2.138>.
- Sciberras, Paul. "Jethro and Moses in Dialogue (Exodus 18: 8–26): Ethics of Communitarian Responsibility." *Religions 14*, no. 5 (Mei 2023): 587. <https://doi.org/10.3390/rel14050587>.
- Sikorski, Christian von, Johannes Knoll, dan Jörg Matthes. "A New Look at Celebrity Endorsements in Politics: Investigating the Impact of Scandalous Celebrity Endorsers and Politicians' Best Responses." *Media Psychology 21*, no. 3 (3 Juli 2018): 403–36. <https://doi.org/10.1080/15213269.2017.1378109>.
- Sunariyanti, Sapto. "Penerapan Etika Kristen dalam Pendidikan Anti Korupsi di Keluarga." *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI 7*, no. 1 (2018): 107–20. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v7i1.46>.
- Syarif, Laode M. "Addressing the Root of Political Corruption in Indonesia", *Integritas 5*, no. 2 (2019): 191-198, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2>.
- Ulum, Muhammad Bahrul. "INDONESIAN DEMOCRACY AND POLITICAL PARTIES AFTER TWENTY YEARS OF REFORMATION: A CONTEXTUAL ANALYSIS." *Indonesia Law Review 10*, no. 1 (30 April 2020). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.577>.

Uroko, Favour. "Jethro's Mentoring of Moses (Exodus 18) and Its Relevance to the Nigerian Clergy." *E-Journal of Religious and Theological Studies* 6, no. 2 (Maret 2020): 135–44. <https://doi.org/10.32051/erats.2020.035>

### **Media Sosial**

Adebomi, Joseph, John Olabode, Olabode Omotosho, dan Humanus Discourse. "Implications of Moses' quality leadership in promoting good governance in the church." *Humanus Discourse* 2 (21 Oktober 2022). [https://www.researchgate.net/publication/364608547\\_Implications\\_of\\_Moses'\\_quality\\_leadership\\_in\\_promoting\\_good\\_governance\\_in\\_the\\_church](https://www.researchgate.net/publication/364608547_Implications_of_Moses'_quality_leadership_in_promoting_good_governance_in_the_church)

Austin, Precept. "Exodus 18 Commentary | Precept Austin," 31 Januari 2024. <https://www.preceptaustin.org/exodus-18-commentary#18:21>.

"Congress of Local and Regional Authorities of The Council of Europe," 31 Januari 2024. [https://doi.org/10.1163/1570-6664\\_iyb\\_SIM\\_org\\_2284](https://doi.org/10.1163/1570-6664_iyb_SIM_org_2284).

Dewberry, David R. *The American Political Scandal: Free Speech, Public Discourse, and Democracy*, 2024. <https://rowman.com/ISBN/9781442242920/The-American-Political-Scandal-Free-Speech-Public-Discourse-and-Democracy>.

Ekawati, Arti. "Indonesia: Corruption Scandals Escalate as Election Nears – DW – 10/18/2023." *dw.com*, 31 Januari 2024. <https://www.dw.com/en/indonesia-corruption-scandals-escalate-as-election-nears/a-67130795>.

Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2023 sebesar 3,92, menurun dibandingkan IPAK 2022," 31 Januari 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2046/indeks-perilaku-anti-korupsi--ipak--indonesia-2023-sebesar-3-92--menurun-dibandingkan-ipak-2022.html>.

Mantalean, Ihsanuddin Vitorio. "Baleg Akali Putusan MK, Perubahan "Threshold" Pilkada Hanya untuk Parpol Tanpa Kursi DPRD." *Kompas*. 21 Agustus 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/21/13495571/baleg-akali-putusan-mk-perubahan-threshold-pilkada-hanya-untuk-parpol-tanpa>

REDAKSI. "Korupsi Lagi, Korupsi Lagi." *kompas.id*, 21 Desember 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/21/korupsi-lagi-korupsi-lagi>.

Richburg, Keith B. "Opinion | Southeast Asian Dynasties Are Rising Again. That's Troubling News." *Washington Post*, 28 November 2023. <https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/11/28/southeast-asia-political-dynasties-rise/>.

Ridwan, Muhammad. "Lembaga Yudikatif di Titik Nadir, 3 Ketua Dipecat Tersangkut Pelanggaran Kode Etik." *Bisnis.com*, 6 Juni 2024. <https://kabar24.bisnis.com/read/20240706/15/1779903/lembaga-yudikatif-di-titik-nadir-3-ketua-dipecat-tersangkut-pelanggaran-kode-etik>

StudyLight.org. "Exodus 18 - Coffman's Commentaries on the Bible - Bible Commentaries," 31 Januari 2024. <https://www.studylight.org/commentaries/eng/bcc/exodus-18.html>.

Suseno, "Ahmad Muhdlor Ali Didakwa Terima Dana Pemotongan Insentif BPPD Sidoarjo," *Tempo* (30 September 2024). <https://metro.tempo.co/read/1922587/ahmad-muhdlor-ali-didakwa-terima-dana-pemotongan-insentif-bppd-sidoarjo>.

Yandwiputra, Ade Ridwan. "Tebar Uang Menjelang Pencoblosan." *Tempo*. 14 Februari 2024. <https://koran-tempo.co.cdn.ampproject.org/v/s/koran.tempo.co/amp/hukum/487253/kasus-politik-uang-pemilu-2024>